

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan reformasi yang semakin menunjukkan hasil adalah salah satunya yaitu adanya otonomi daerah, maka Pemerintahan Daerah mulai mengatur dan membenahi pemerintahannya sendiri agar dapat melaksanakan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha – usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Dengan mengoptimalkan PAD diharapkan suatu daerah tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik dan mampu mensejahterakan masyarakat. Pengalaman sebelum adanya otonomi daerah menunjukkan bahwa hampir disemua daerah prosentase PAD relatif kecil. Pada umumnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) suatu daerah di dominasi oleh sumbangan Pemerintah Pusat dan sumbangan – sumbangan lain,

yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada Pemerintahan Pusat, sehingga kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas.

Kecilnya prosentase PAD pada suatu daerah tidak disebabkan oleh miskinnya daerah tersebut tetapi lebih mengarah kepada kebijakan Pemerintah Pusat yang selalu menguasai sumber-sumber keuangan yang potensial, sehingga Pemerintah Daerah tidak memberi kesempatan untuk mengelolanya sendiri. Hal ini menjadi pokok permasalahan yang dihadapi dalam rangka otonomi, yaitu tidak optimalnya PAD sebagai sumber keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.

Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat harus ditekan seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan tersebut akan mengatur secara pasti pengalokasian dana perimbangan yaitu bagian dari penerimaan negara yang dihitung menurut kriteria berdasarkan objektivitas, pemerataan dan keadilan. Kondisi yang diharapkan terjadi dalam era otonomi adalah adanya perubahan secara bertahap bagi daerah yang bermula dan upaya mengurangi ketergantungan dari Pusat, menuju kemandirian daerah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang otonomi daerah”?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang otonomi daerah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis, untuk mengetahui sejauhmana teori yang selama ini diperoleh di bangku perkuliahan serta aplikasinya untuk memecahkan permasalahan yang timbul pada Pemerintah Kota Nganjuk
2. Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang.

